

# **PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

Oleh: Asykar Nurul Hidayah

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan  
*Musyrifah* di Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta

## **Abstrak**

Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mengajarkan kepada anak didik tentang bagaimana menanamkan sikap saling menghormati, toleransi dan menghargai antara sesama dalam nuansa pluralisme. Pendidikan semacam ini diperlukan agar setiap perbedaan dapat dikelola dengan baik dan pada tahap selanjutnya tidak menimbulkan konflik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimanapun, nilai-nilai multikultural juga telah menjadi watak hakiki agama Islam. Hal ini terlihat jelas di pelbagai ajaran dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. yang tidak membedakan manusia pada bidang ilmu. Karena itu, penanaman nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural, seperti: demokrasi, humanisme dan pluralisme atau nilai-nilai keberagaman yang inklusif pada diri anak didik merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

**Kata Kunci:** Pendidikan Multikultural, Pluralisme, Toleransi dan Universalitas Islam

## **A. Pendahuluan**

Di negara-negara yang menganut sistem demokratis, seperti Amerika Serikat dan Kanada, gagasan tentang pendidikan multikultural bukanlah hal yang baru. Mereka telah cukup lama melaksanakan konsep itu, khususnya dalam upaya menghilangkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dan hitam. Pelbagai model pendidikan multikultural diterapkan di negara-negara itu dengan tujuan untuk menunjukkan dan memelihara integritas nasional (Said Agil, 2005: 205). Lantas, bagaimanakah implementasi konsep pendidikan multikultural ini di Indonesia?

Sebagaimana diketahui jika Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kenyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografi Indonesia yang begitu beragam dan luas. Keragaman ini tentu saja memiliki dampak positif dan negatif. Pada sisi positif, Indonesia memiliki potensi strategis untuk membangun citra (*image building*) di mata dunia sebagai negara yang

berkekayaan melimpah. 17.565 pulau besar dan kecil yang di dalamnya terdapat pelbagai ragam seni-budaya masyarakat, perbedaan bahasa daerah serta banyaknya sumber daya alam menjadikan segenap kalangan terpesona dengan mozaik Indonesia.

Sementara, pada sisi negatif, keragaman Indonesia juga dapat menimbulkan pelbagai persoalan yang tiada kunjung surut dan bahkan grafiknya terus saja meningkat. Kasus-kasus seperti korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), kemiskinan, kekerasan, perusakan lingkungan, separatisme dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak orang lain merupakan bentuk nyata dari “potret kelam” multikulturalisme di Indonesia. Konflik antarsuku di Papua, “pertarungan” orang Madura dengan Dayak, kasus Ambon, Sampit dan perlawanan Front Pembela Islam (FPI) terhadap kelompok Ahmadiyah juga telah menambah “daftar hitam” atas multikulturalisme di Indonesia.

Kejadian-kejadian tersebut di atas seolah-olah telah menunjukkan hilangnya akal sehat dan lumpuhnya nurani antaranak bangsa. Segala sesuatunya selalu dipaksakan dengan tanpa adanya dialog antarindividu maupun kelompok sosial-keagamaan yang saling berseteru. Dampak dari hal ini adalah munculnya sikap-sikap sarkastis, untuk tidak dikatakan “barbarian”! Kelompok-kelompok ini cenderung mengunggulkan otot daripada otak dalam menyelesaikan setiap persoalan. Sikap-sikap semacam ini tidak lain didorong oleh klaim-klaim kebenaran (*claim of truth*) tunggal sebagaimana yang mereka pahami.

Jika saja fenomena itu ditelisik lebih lanjut, maka akar persoalan mengenai klaim-klaim kebenaran yang berkembang di masyarakat, khususnya umat Islam, bermuara pada pendidikan agama. Pada tataran realitas, kenyataan menunjukkan jika pendidikan agama masih diajarkan dengan cara menafikkan hak hidup agama lain. Seakan-akan hanya agamanya sendirilah yang dinilai benar dan mempunyai hak untuk hidup, sementara yang lain salah, tersesat dan terancam hak hidupnya. Hal ini bukan hanya berlaku bagi mereka yang berada di lingkungan mayoritas, tetapi juga minoritas. Secara fundamental, semangat pendidikan agama yang sempit ini sudah barang tentu berlawanan dengan spirit ajaran Islam dan pendidikan multikultural.

Dalam batas-batas tertentu, semangat persatuan bangsa juga akan semakin pudar dan terkikis dengan adanya pemahaman yang demikian.

Memandang kenyataan di atas, maka segenap umat muslim harus memahami dan menyikapi persoalan tersebut secara cerdas dan cermat. Umat muslim harus mengkaji kembali spirit dan ajaran Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an. Di samping itu juga diperlukan adanya strategi khusus untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut melalui pelbagai bidang kehidupan, seperti: bidang sosial, ekonomi, budaya dan juga pendidikan.

Menurut hemat penulis, dengan tanpa menafikkan keberadaan sektor kehidupan yang lainnya, bidang pendidikan memang memiliki peran strategis dalam menjawab problem-problem tersebut. Mengapa demikian? Sebab, lewat pendidikan, anak didik dapat dididik agar memiliki kesadaran tentang hakikat masyarakat yang majemuk. Kesadaran tentang kemajemukan ini memang perlu dikembangkan dalam pendidikan. Mengingat, konflik horizontal yang berkembang selama ini berakar dari begitu lemahnya kesadaran masyarakat tentang kemajemukan. Oleh sebab itulah gagasan multikulturalisme menjadi penting untuk dihadirkan di dalam lingkungan pendidikan.

Bagaimanapun, pendidikan multikultural telah menawarkan satu alternatif solusi melalui penerapan strategi-strategi khusus. Selain itu, konsep ini juga berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada dalam masyarakat, seperti latarbelakang sosial-ekonomi, etnis, budaya dan bahasa anak didik. Pemanfaatan keragaman ini sungguh sangat memungkinkan hadirnya kesadaran baru dalam diri anak didik untuk tidak mengkotak-kotakkan latarbelakang yang beragam. Atas dasar urgensi pendidikan multikultural tersebutlah tulisan ini dibuat. Melalui tulisan ini, penulis hendak mengkaji lebih jauh tentang konsep pendidikan multikultural dari sudut pandang Islam.

## **B. Pengertian Pendidikan Multikultural**

Pendidikan multikultural merupakan suatu proses penanaman nilai dan cara hidup seseorang agar dapat menghormati, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman

budaya yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat plural (majemuk). Dengan definisi ini, pendidikan multikultural diharapkan mampu membangun kekenyalan dan kelenturan mental segenap anak bangsa dalam menghadapi pelbagai konflik sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan multikultural memungkinkan terjadinya penguatan persatuan bangsa sehingga hal tersebut tidak mudah patah dan retak.

Terkait dengan hal tersebut, Rektor baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Musa Asy'ari, memiliki pemahaman yang sama dengan definisi pendidikan multikultural di atas. Menurutnya, iklim Indonesia yang dikenal sarat kemajemukan sangat dimungkinkan penerapan pendidikan multikultural. Gagasan ini, lanjut Musa, menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola dengan cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan ([www.uin-suka.info/ind/index.com](http://www.uin-suka.info/ind/index.com)).

Esensi pendidikan multikultural, sebagaimana pernyataan Musa itu, tidak dapat lepas begitu saja dari pengelolaan perbedaan kebudayaan dan kultur lingkungan yang terbangun di seluruh hamparan bumi Indonesia. Dalam bahasa lain, pembahasan tentang pendidikan multikultural tidak dapat dipisahkan dari keragaman budaya dan lingkungan masyarakat Indonesia. Karena itu, segenap perbedaan yang lahir dari pelbagai budaya dan lingkungan masyarakat bukan untuk dibenturkan dalam ruang konflik, tetapi harus dikelola sehingga dapat melahirkan suatu khazanah keragaman yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Pada dasarnya, awal mula konsep pendidikan multikultural ini lahir dari perkembangan gagasan dan kesadaran tentang interkulturalisme setelah perang dunia II (H.A.R. Tilaar, 2002: 495). Kemunculan gagasan dan kesadaran tentang interkulturalisme ini, menurut Said Agil, selain terkait dengan perkembangan politik internasional yang menyangkut persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), kemerdekaan dari kolonialisme dan diskriminasi rasial, juga disebabkan karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri, sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara yang baru saja merdeka ke Amerika dan Eropa (Said Agil, 2005: 208).

Memandang akar sejarah tersebut, maka secara genetik, pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang (dengan sengaja) dibuat dan bertujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua anak didik yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Selain itu, salah satu tujuan penting dari konsep ini adalah membantu semua anak didik agar memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada suatu tatanan masyarakat yang demokratis-pluralistik. Dengan demikian, diperlukan adanya proses interaksi, negosiasi dan komunikasi dengan pelbagai ragam kelompok sosial masyarakat agar tercipta sebuah kultur masyarakat yang bermoral demi kebaikan bersama.

Memang, secara sederhana, kata multikultural dapat dipahami sebagai keragaman budaya dalam suatu komunitas. Keragaman budaya (multibudaya) ini merupakan suatu fakta empiris yang harus diterima dan dipahami oleh semua orang. Di dalam komunitas atau masyarakat multibudaya ini (umumnya) terdapat proses interaksi, toleransi, integrasi dan bahkan juga disintegrasi. Kecuali yang terakhir, proses-proses yang terbangun di dalam masyarakat multibudaya tersebut mustinya dapat dikelola secara positif sehingga memungkinkan terjadinya perkembangan kebudayaan.

Pengertian masyarakat multibudaya dan multikulturalisme ini pertama kali diperkenalkan oleh salah seorang Sosiolog, Charles Hobart, pada Konferensi Dewan Kanada di Winnipeg/Manitoba tahun 1964. Pada saat itu, kedua pengertian tersebut lahir karena didasari oleh fenomena migrasi multietnis dan masyarakat dalam ruang lingkup yang cukup besar. Sekalipun pada akhirnya konsep itu masih problematik, namun masyarakat multibudaya dapat dinyatakan sebagai sebuah kumpulan masyarakat yang memiliki kebudayaan beraneka ragam dan semuanya saling eksis di suatu wilayah. Di dalam masyarakat ini terdapat dua atau lebih kelompok sosial yang terpisah dari kelompok mayoritas, tetapi di antara mereka memiliki kesadaran akan perasaan kebersamaan dan identitas menyeluruh untuk hidup bersama dalam nuansa tenteram, aman serta damai (<http://blog.unila.ac.id/effendisanusi>).

Potret kehidupan masyarakat multikultural, sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya telah disinggung Allah s.w.t. Di dalam Q.s. al-Ma'idah: 48, Allah s.w.t. berfirman yang artinya: *untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.*

Potongan ayat tersebut ditafsirkan Quraish Shihab (2001: 104) sebagaimana berikut: kata *lau*/sekiranya (sekiranya Allah menghendaki) menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dikehendaki-Nya. Sebab, kata *lau* tidak digunakan kecuali untuk mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi (mustahil). Dengan demikian, Allah s.w.t. tidak menghendaki manusia dari dahulu hingga sekarang menjadi satu umat, yakni satu pendapat, satu kecenderungan dan bahkan dalam satu agama dengan segala prinsip dan rinciannya.

Jika saja Allah s.w.t. menghendaki yang demikian, lanjut Shihab, Dia tidak akan memberi kebebasan manusia dalam memilah dan memilih, termasuk kebebasan memilih agama dan kepercayaan. Maksud diberikannya kedua kebebasan ini adalah agar manusia dapat saling berlomba-lomba dalam kebajikan. Dengan demikian akan terjadi kreativitas dan peningkatan kualitas diri manusia. Sebab, hanya dengan perbedaan dan perlombaan yang sehat, kedua hal tersebut akan tercapai.

### **C. Rekam Jejak Diseminasi Pendidikan Multikultural**

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya jika gagasan tentang pendidikan multikultural tidak muncul dalam ruang yang kosong. Terdapat faktor sosial, politik, ekonomi dan intelektual yang telah mendorong munculnya gagasan ini. Pada awal kelahirannya, wacana pendidikan multikultural sangat "bias" Amerika. Sebab, konsep ini memiliki akar sejarah dengan gerakan HAM yang muncul dari pelbagai kelompok tertindas di negeri "Paman Sam" itu.

Banyak hasil penelusuran sejarah tentang konsep pendidikan multikultural yang merujuk pada gerakan-gerakan sosial orang Amerika keturunan Afrika dan kelompok berwarna kulit lainnya yang sedang mengalami praktik diskriminasi di lembaga-lembaga publik. Di antara banyak lembaga yang disorot karena “bermusuhan” dengan ide persamaan hak dan ras adalah institusi pendidikan. Hal ini terjadi bersamaan dengan masa perjuangan HAM pada tahun 1960-an.

Pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, suara-suara kritis dikumandangkan para aktivis, tokoh dan orangtua. Mereka menuntut agar lembaga-lembaga pendidikan bisa konsisten dalam menerima serta menghargai perbedaan. Selain itu, tuntutan yang tidak kalah penting ialah persamaan pemberian kesempatan pekerjaan dan pendidikan. Gejolak sosial demi dihapuskannya diskriminasi inilah momentum yang hingga saat ini dianggap sebagai awal mula kemunculan konsep pendidikan multikultural.

Setelah sepuluh tahun berlalu, sekitar awal tahun 1980-an, ide pendidikan multikultural ini mulai terlembagakan. Pada saat itu, banyak lahir lembaga-lembaga pendidikan yang berlandaskan pendidikan multikultural. Lembaga-lembaga ini didirikan oleh para peneliti dan aktivis pendidikan progresif, seperti halnya James Bank. James Bank adalah salah seorang *pioneer* pendidikan multikultural yang juga membumikan konsep tersebut menjadi ide persamaan pendidikan. Selanjutnya, pada pertengahan dan akhir tahun 1980-an, muncul kelompok Sarjana seperti Carl Grant, Christine Sleeter, Geneva Gay dan Sonia Nieto yang memberikan wawasan lebih luas mengenai pendidikan multikultural dengan memperdalam kerangka kerja untuk membumikan ide persamaan pendidikan dan menghubungkannya dengan transformasi dan perubahan sosial.

Setelah menjalani perjuangan cukup lama, akhirnya ide pendidikan multikultural dapat diterima dan bahkan menjadi komitmen masyarakat global. Hal ini bisa dilihat dari empat rekomendasi yang dikeluarkan oleh UNESCO pada bulan Oktober 1994 di Jenewa, yaitu: *pertama*, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinekaan pribadi, jenis

kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerjasama dengan yang lain.

*Kedua*, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkuat perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. *Ketiga*, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dengan tanpa adanya kekerasan. Karenanya, pendidikan hendaknya mampu meningkatkan pengembangan sikap-sikap yang mengedepankan perdamaian dalam diri dan pikiran anak didik. Dengan demikian setiap anak didik mampu membangun kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan sekaligus memeliharanya secara lebih kokoh.

Tiga rekomendasi yang dikeluarkan UNESCO tersebut merupakan tonggak diseminasi (persebaran) gagasan pendidikan multikultural ke pelbagai negara di luar negeri "Paman Sam" (Amerika). Gagasan ini mudah diadaptasi oleh negara-negara yang memiliki keragaman etnis, ras, agama dan budaya, seperti halnya di Indonesia. Kendati demikian, di tengah perjalanannya, konsep ini juga mengalami perluasan makna. Dalam istilah lain, konsep pendidikan multikultural juga mencakup ide-ide pluralisme budaya dengan tema-tema umum, seperti pemahaman budaya, penghargaan budaya dari kelompok yang beragam serta persiapan untuk hidup dalam masyarakat pluralistik.

Di Indonesia, perbincangan seputar pendidikan multikultural semakin mendapatkan posisi dan momentum yang tepat pasca pemerintahan Orde Baru lengser karena hempasan gelombang reformasi. Peralihan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi acapkali memunculkan euforia politik bagi masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, reformasi ternyata bukan hanya membawa "berkah" bagi bangsa Indonesia, tetapi juga memberi peluang meningkatnya kecenderungan sikap-sikap primordialisme antarkelompok masyarakat.

Fenomena semacam ini sesungguhnya telah dialami oleh masyarakat di bekas negara Uni Soviet. Setelah diruntuhkannya Tembok Berlin, sebagai pertanda

berakhirnya perang dingin dan peralihan sistem pemerintahan sentralistik (otoritarian) ke demokrasi, segenap masyarakat di sana mengalami euforia politik. Hampir semua dari mereka menciptakan simbol dan budaya baru, yang pada tahap selanjutnya hal itu dijadikan sebagai tameng perlindungan masing-masing komunitas. Ini merupakan titik-tolak kemunculan sikap-sikap primordialisme antarkelompok yang ada di negara-negara bekas Uni Soviet tersebut. Konflik yang sebelumnya terbangun berdasarkan pertempuran antarideologi negara (Amerika versus Uni Soviet), selanjutnya telah bergeser antarkomunitas masyarakat.

Terjadinya konflik horizontal yang dialami oleh masyarakat bekas Uni Soviet itu sejalan dengan apa yang telah dialami oleh masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Karena itu, menjadi wajar jika hingga saat ini, dipandang perlu menerapkan paradigma pendidikan multikultural. Penerapan paradigma ini dimaksudkan untuk menangkal semangat-semangat primordialisme antaranak bangsa. Multikulturalisme akan menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan kesuku-bangsaan dalam masyarakat Indonesia yang multikultural.

#### **D. Implementasi Pendidikan Multikultural**

Sejumlah uraian yang telah penulis kemukakan di atas telah memberi gambaran akan penting dan bermanfaatnya pendidikan multikulturalisme dalam membangun kohesifitas, soliditas dan intimitas di antara keragaman etnik, ras, agama, budaya dan juga kebutuhan masyarakat. Urgensi konsep ini setidaknya dapat memberi dorongan dan spirit bagi segenap institusi pendidikan nasional untuk menanamkan sikap kepada anak didik agar menghargai perbedaan budaya, agama dan keyakinan orang lain. Dengan mengimplementasikan pendidikan yang berwawasan multikultural diharapkan dapat membantu anak didik agar mampu mengerti, menerima dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai kepribadian.

Sangat disadari jika upaya membina dan mengelola suatu bangsa dengan beragam adat dan budaya yang tersebar di pelbagai wilayah di Indonesia tidaklah mudah.

Upaya semacam ini tentu perlu ditunjang dengan adanya desain strategi yang kuat agar bisa sistematis dalam melakukannya. Penetapan tujuan pembangunan pendidikan nasional jangka menengah merupakan salah satu bentuk strategi yang telah dilakukan pemerintah selama ini. Di antara tujuan jangka menengah itu adalah peningkatan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil, tidak diskriminatif dan demokratis dengan tanpa membedakan tempat tinggal, status sosial-ekonomi, jenis kelamin, agama, kelompok etnis dan kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual.

Dengan adanya tujuan jangka menengah itu, agaknya pemerintah hendak menjadikan (lembaga) pendidikan sebagai laboratorium penanaman semangat multikulturalisme bagi anak didik. Hal ini berarti bahwa sekolah merupakan medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk bisa menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan kemauan hidup bersama secara damai. Agar proses ini dapat berjalan sesuai harapan, maka diperlukan adanya sosialisasi dan diseminasi secara terus-menerus pada segenap institusi pendidikan. Bahkan, jika memungkinkan, konsep pendidikan multikultural ini dapat ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum di pelbagai jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta.

Perlu disadari bahwa paradigma multikultural telah menjadi salah satu *concern* dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tahun 2003. Pasal 2 dalam UU ini menyebutkan jika pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Karena itu, implementasi paradigma ini di lapangan dituntut agar berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini: (1) menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang; (2) kurikulum yang dicapai harus sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda; (3) mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama; (4) mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya

sehingga mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri; dan (5) harus didasarkan kepada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.

Sekalipun telah ada prinsip-prinsip pokok pendidikan multikultural dalam pendidikan nasional, namun pada tahap implementasinya hal tersebut tidak bisa diseragamkan. Terkadang, wujud implementasi ini sangat disesuaikan dengan iklim dan kebijakan di masing-masing daerah, khususnya sekolah. Bahkan, untuk konteks negara saja terdapat perbedaan dalam mengimplementasikan gagasan ini. Model implementasi pendidikan multikultural di Indonesia sangat jauh berbeda dengan negara-negara lain. Untuk itu, terdapat keragaman tujuan dan penerapan strategi serta sarana yang digunakan dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural.

Menurut Said Agil (2005: 210), sejumlah kritikus melihat bahwa revisi kurikulum pendidikan yang dilakukan dalam program pendidikan multikultural di Inggris dan beberapa tempat di Australia serta Kanada lebih terbatas pada keragaman budaya yang ada sehingga hanya berdimensi kognitif. Penambahan informasi tentang keragaman budaya merupakan model pendidikan yang mencakup revisi isi atau materi pembelajaran, termasuk revisi buku-buku teks. Sementara di Indonesia masih diperlukan usaha yang panjang dalam merevisi buku-buku teks, sehingga dapat mengakomodasi kontribusi dan partisipasi warga dari pelbagai latarbelakang. Sikap inklusivitas ini sangat penting, mengingat Indonesia masih memerlukan materi yang mampu mengatasi “dendam sejarah” di pelbagai wilayah yang tidak kunjung berkesudahan.

Di samping merevisi materi juga diperlukan adanya reformasi sistem pembelajaran pendidikan multikultural. *Affirmative action* dalam seleksi anak didik hingga rekrutmen tenaga pengajar di Amerika misalnya, merupakan salah satu strategi untuk membuat perbaikan ketimpangan struktural terhadap kelompok-kelompok minoritas. Demikian halnya dengan model Sekolah Pembauran Iskandar Muda di Medan yang memfasilitasi interaksi anak didik dari pelbagai latarbelakang budaya dan menyusun program anak asuh lintas kelompok sosial.

Sistem pendidikan dan sekolah yang telah disebutkan di atas lebih menempatkan posisi institusi pendidikan sebagai medium perubahan perspektif anak didik tentang adanya perbedaan. Harapannya, ketika anak didik telah memiliki perubahan persepsi maka akan terjadi pula perubahan masyarakat di masa yang akan datang. Perubahan dan implementasi pendidikan multikultural di lapangan tentu saja sangat tergantung dari tinjauan yang dilakukan, apakah pendidikan multikultural itu dimaknai sebagai filsafat, metodologi untuk melakukan reformasi pendidikan atau hanya sekedar satu set substansi pelajaran dengan program-program pembelajarannya.

Sebagai sebuah wacana baru, pendidikan multikultural di Indonesia tidak saja dapat diimplementasikan melalui pendidikan formal, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat maupun keluarga (non formal). Dalam pendidikan formal, konsep pendidikan multikultural dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan, seperti melalui kurikulum dari tingkat PAUD (Pendidikan Usia Dini), SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi. Di lembaga-lembaga pendidikan formal ini, implementasi pendidikan multikultural tidak harus dirancang dalam suatu materi khusus, tetapi dapat diintegrasikan melalui kurikulum, bahan ajar yang telah ada serta model pembelajaran.

Di tingkat Perguruan Tinggi, integrasi tersebut dapat dilakukan melalui mata kuliah umum, seperti Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*), ISBD, agama dan juga bahasa. Pada tingkat PAUD, integrasi dapat dilakukan lewat *out bound* program, sementara di tingkat SD, SMP dan SMA dapat diintegrasikan ke dalam bahan ajar seperti: PPKn, Agama, Sosiologi dan Antropologi. Selain itu, integrasi juga dapat dilakukan melalui model pembelajaran seperti pembentukan kelompok-kelompok diskusi, kegiatan ekstra kurikuler dan lain sejenisnya.

Sedangkan, dalam bentuk pendidikan non formal konsep pendidikan multikultural ini dapat disosialisasikan melalui pelatihan-pelatihan yang menekankan pada konteks penghormatan terhadap perbedaan suku, ras maupun agama antaranggota masyarakat. Selain lewat pelatihan-pelatihan non formal, konsep ini juga dapat diimplementasikan dalam lingkup keluarga. Sebagai institusi sosial terkecil di masyarakat, keluarga juga

dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran paling efektif dalam proses internalisasi, transformasi nilai serta sosialisasi terhadap segenap anggota keluarga.

Keberadaan orangtua di dalam suatu keluarga tentu saja memiliki posisi sentral untuk mentransformasikan gagasan pendidikan multikultural, baik kepada anak-anaknya sendiri maupun anggota keluarga lainnya. Di sini, peran orangtua harus lebih responsif dalam menanamkan nilai-nilai multikulturalisme. Sebagai contoh misalnya, orangtua mendidik anak-anaknya agar selalu mengedepankan penghormatan dan pengakuan terhadap perbedaan ras, agama dan golongan-golongan yang ada di sekitar lingkungannya. Model pendidikan keluarga semacam ini merupakan cara-cara paling efektif dan elegan dalam mendukung terwujudnya sistem sosial yang aman, damai, terbuka dan berkeadilan.

Apabila model pendidikan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik niscaya bangsa ini akan dapat terhindar dari pelbagai macam konflik sosial-keagamaan. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya jika akar persoalan terjadinya konflik keagamaan selama ini disebabkan karena paradigma keagamaan masyarakat yang (cenderung) bersifat eksklusif dan anti-dialog. Karena itulah, menjadi penting untuk merumuskan langkah-langkah preventif dalam membendung berkembangnya paradigma yang demikian itu. Langkah preventif ini dapat dilakukan dengan membangun pemahaman keagamaan yang lebih inklusif-pluralis, multikultural, humanis, dialogis-persuasif, kontekstual. Langkah-langkah ini dapat ditempuh lewat jalur pendidikan, media massa dan interaksi sosial.

Lantas, bagaimanakah cara yang dapat dilakukan untuk membangun pemahaman keberagaman anak didik yang inklusif di lembaga pendidikan? Jika peran orangtua di keluarga berada pada posisi sentral, maka di lembaga pendidikan peran kunci itu terletak pada diri guru. Hal ini berarti bahwa guru mempunyai posisi penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman inklusif di lembaga pendidikan. Adapun peran-peran yang dapat dilakukan guru dalam mengimplementasikan hal itu adalah sebagai berikut, *pertama*, guru berwawasan multikultural harus mampu

bersikap demokratis, baik di dalam sikap maupun perkataannya yang tidak diskriminatif.

*Kedua*, guru semestinya memiliki kepekaan dan kepedualian sosial yang tinggi, khususnya yang terkait dengan kejadian-kejadian tertentu yang memiliki hubungan dengan bidang keagamaan. Di dalam mensikapi tragedi Bom Bali pada tahun 2003 misalnya, guru yang berwawasan multikultural tidak saja menjelaskan tentang kejadian tersebut secara apa adanya. Akan tetapi, guru juga perlu menjelaskan fenomena lain (motif) di balik peristiwa itu, sehingga memunculkan rasa keprihatinan yang tinggi dalam diri anak didik.

*Ketiga*, guru berwawasan multikultural seharusnya dapat menjelaskan bahwa inti dari ajaran agama adalah menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian maka perilaku pengeboman, invasi militer dan segala bentuk kekerasan merupakan sesuatu tindakan yang dilarang agama. *Keempat*, guru yang berwawasan multikultural harus mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan pelbagai permasalahan yang berkaitan dengan keragaman budaya, etnis dan juga agama.

#### **E. Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Al-Qur'an**

Tujuan mendasar yang ingin dicapai dalam pendidikan multikultural adalah berkembangnya sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai di kalangan anak didik. Berkaitan dengan tujuan ini, Islam telah lama mengajarkan hal tersebut jauh sebelum adanya deklarasi HAM yang digagas orang-orang Barat. Islam sesungguhnya telah banyak mengajarkan kepada umatnya agar selalu menghormati dan menghargai orang lain dengan tanpa memandang perbedaan status sosial-ekonomi, golongan dan bahkan agama sekalipun. Sejalan dengan hal ini, Q.s al-Hujarat: 11-12, telah melarang manusia untuk merendahkan dan menghina orang lain. Bahkan Islam sendiri memandang sangat hina dan tercela terhadap perbuatan *ghibah* (membicarakan aib orang lain).

Menurut Halim (1999: 105), toleransi sejatinya lahir dari watak hakiki Islam yang menjadi satu-satunya agama yang tidak dinamai menurut ras manusia, seperti agama Yahudi dan Hindu atau menurut nama seseorang seperti Budha serta Kristen. Islam adalah nama yang diberikan Allah s.w.t. sendiri, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an, yang mengandung arti "beribadah kepada Allah", pengabdian kepada Allah semata" dan secara konvensional diterjemahkan sebagai "*submission to God*" (sikap tunduk kepada Allah s.w.t.).

Ketika diadakan kajian terhadap isu toleransi di dalam Islam, ternyata ditemukan perbedaan yang cukup signifikan dengan istilah yang selama ini dipakai di dunia Barat. Untuk menyebut kata toleransi, Islam menggunakan istilah *tasamuh* yang mempunyai dua macam konotasi, yakni: kemurahan hati (*jud wa karam*) dan kemudahan (*tasahul*). Untuk itu, kaum muslim di tanah Arab ketika berbicara tentang *tasamuh al-Islam* dan *al-tasamuh al-din* cenderung menggunakan cara yang sangat berbeda dengan penggunaan istilah tersebut dalam bahasa Inggris.

Dalam bahasa Inggris, kata toleransi diartikan dengan *tolerance*. Kata ini menunjukkan adanya sebuah otoritas berkuasa dengan enggan "bersikap sabar" atau "membiarkan" orang lain berbeda. Sementara, kandungan dari istilah Arab tersebut (*tasamuh*) justru menunjukkan kemurahan hati dan kemudahan dari kedua belah pihak atas dasar saling pengertian. Dalam banyak kesempatan, istilah itu selalu digunakan dalam bentuk resiprokal, yakni hubungan timbal-balik.

Di dalam Islam, Allah s.w.t. bukanlah Tuhan orang Arab atau kaum muslim saja, tetapi Tuhan seluruh umat manusia dan alam (*rabbul 'alamin*). Terkait dengan hal ini, Allah s.w.t. berfirman dalam Q.s. al-Isra': 70 yang artinya "...*dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan*". Kandungan dari isi surat ini ialah semua anak-cucu Adam "dipilih" Allah s.w.t. untuk dimuliakan. Allah s.w.t. memudahkan anak Adam untuk memperoleh penghidupan.

Selain itu, Islam juga bukanlah agama yang eksklusif. Islam merupakan bagian dari keseluruhan sejarah agama-agama yang ada. Kitab sucinya, al-Qur'an, melanjutkan dan membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Nabinya hanyalah salah satu dari mata rantai Nabi-Nabi yang wajib diimani oleh kaum muslim. Di dalam al-Qur'an, orang-orang Kristen dan Yahudi yang hidup di tengah-tengah mayoritas umat muslim disebutkan dengan istilah yang terhormat, *ahl-al kitab* (ahli kitab, pemegang kitab), dan bukannya sebagai kaum minoritas sebagaimana sebutan bagi kelompok agama lain yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Barat.

Sejalan dengan hal itu, al-Qur'an tidak menjustifikasi seluruh ahli kitab sebagai orang yang tidak bisa diterima dan tidak jujur. Dalam Q.s. ali-Imran: 75, Allah s.w.t. berfirman sebagaimana berikut: *“di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang-orang yang jika kami mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kami selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang ummi (orang Arab). Mereka berkata berdusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.*

Al-Qur'an juga memerintahkan kepada kaum muslim untuk tidak berdebat dengan ahli kitab, kecuali lewat cara-cara yang adil dan mengimani apa yang telah diturunkan kepadanya. Perintah Allah s.w.t. ini mengandung tujuan untuk mengesampingkan perbedaan yang hanya dapat diselesaikan pada hari pengadilan nanti. Perintah ini seringkali diulang-ulang dalam al-Qur'an. Bahkan, dalam berhubungan dengan kaum musyrikin yang secara ekstrim berlawanan dengan prinsip tauhid agama Islam, umat Islam tetap diperintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepadanya. Perintah ini sejalan dengan apa yang terdapat dalam Q.s. al-Mumtahanah: 8: *“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu: sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.*

Di samping itu, perbedaan warna kulit, bahasa dan ras dipandang sebagai bentuk (tanda) kekuasaan serta kasih sayang Allah s.w.t. kepada umatnya. Perbedaan yang demikian ini semestinya dapat menciptakan kedekatan antarumat, dan bukan justru memunculkan sikap diskriminasi atau tidak toleran. Sehubungan dengan pensikapian terhadap perbedaan ini, Allah s.w.t. telah dengan tegas dan jelas berfirman dalam Q.s. al-Hujurat: 13 dan ar-Rum: 22. Perintah-perintah semacam ini di dalam al-Qur'an memang tidak dibatasi atau hanya sekedar "basa-basi". Akan tetapi, hal itu justru di ulang-ulang dan menjadi bagian dari keseluruhan struktur pesan Islam.

Di dalam Q.s. ar-Rum: 22 Allah s.w.t. berfirman sebagaimana berikut: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui"*. Sedangkan, dalam Q.s. al-Hujurat: 13, Allah berfirman *"hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"*.

Melihat firman-firman yang disampaikan Allah s.w.t. dalam al-Qur'an tersebut selanjutnya menjadi jelas bahwa (sikap) toleransi telah sejak awal menjadi bagian hakiki dan tidak terpisahkan dari Islam. Dalam hal ini, al-Qur'an tidak dengan rasa enggan bertoleransi kepada mereka yang tergolong non-muslim. Al-Qur'an sangat menyambut baik kehadirannya untuk hidup dengan leluasa di dalam suatu sistem masyarakat Islam, yang di dalamnya terdapat pelbagai aturan dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Islam.

Sikap toleran semacam itu juga dapat dijumpai atau di lihat dalam fakta sejarah Islam. Rasulullah telah mencontohkan penerapan nilai-nilai toleransi dan pluralisme al-Qur'an ketika pertama kali hijrah ke Madinah. Saat itu, Rasulullah tidak hanya mampu mendamaikan dua kelompok yang senantiasa bertikai, yaitu Aus dan Khazraj

tetapi juga mampu menerapkan jargon “*no compulsion in religion*” terhadap masyarakat Madinah. Hal ini juga dapat dijumpai dalam kehidupan para sahabat dan ulama terdahulu. Pada masa puncak kejayaan Islam, al-Qur’an telah menerapkan prinsip seperti: *lâ ikrâha fii ad-diin* (tidak ada paksaan dalam agama), sebagaimana terdapat dalam Q.s. al-Baqarah: 256. Prinsip ini juga telah diperkuat dengan firman Allah s.w.t. dalam surat al-Kafirun: 6: “*bagiku agamaku; bagimu agamamu*”.

Menurut Hasan Langgalung (1988: 165), ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan betapa Islam bersifat sangat universal (*syamil*), toleran dan terpadu sehingga sistem-sistem lain dapat tumbuh di dalamnya dengan subur. Wajah Islam yang ramah dan penuh rahmat sangat tampak, terutama di zaman kegemilangannya, di mana orang-orang non-muslim mendapat perlakuan sangat baik. Keberhasilan Islam ini tentu sangat bertalian erat dengan proses pendidikan yang dijalankan saat itu. Sifat universalitas Islam yang dipadukan dengan prinsip toleransi memunculkan kesan Islam benar-benar sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Memang, Allah s.w.t. telah menciptakan manusia dengan pelbagai prinsip perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam diri manusia merupakan *sunnatullah*. Perbedaan ini tidak hanya dalam bentuk rupa (fisik), tetapi juga dalam keimanan yang dianut oleh manusia. Allah s.w.t. sendiri telah memberikan kebebasan kepada masing-masing manusia untuk beriman ataupun tidak. Kebebasan manusia untuk memilih (keyakinan) ini tentu diiringi dengan pelbagai bentuk konsekuensi yang harus ditanggung masing-masing individu.

Pernyataan tersebut selanjutnya dapat dimaknai bahwa wawasan multikultural dan pluralisme tidak berarti meniadakan adanya kegiatan dakwah. Bahkan dengan konsep seperti ini banyak orang yang tertarik untuk memeluk agama Islam pada masa Nabi. Mereka melihat bagaimana Nabi Muhammad s.a.w. memperlihatkan keindahan Islam lewat perilaku mulia Beliau yang tidak pernah mempersoalkan perbedaan di antara manusia dalam hal sosial-kemasyarakatan (*muamalah duniawiyah*).

Dengan demikian, Islam sendiri sesungguhnya telah menerapkan apa yang menjadi tujuan utama pendidikan multikultural jauh sebelum konsep tersebut ada. Di

dalam Islam, manusia diperintahkan untuk bisa menghargai pelbagai perbedaan yang bukan saja dilihat dari bentuk fisik, ras, budaya, bahasa tetapi juga golongan keagamaan. Selain Islam sebagai agama, ajaran semacam ini juga dibumikan dalam pendidikan. Hal ini dapat dilihat dalam tujuan pendidikan Islam, sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits.

Menurut Ismail (2004:78-79), terdapat empat tujuan pendidikan yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits, yaitu: *pertama*, membentuk pribadi-pribadi muslim yang berkualitas, baik dalam arti karakter maupun pemikiran. *Kedua*, menciptakan masyarakat yang memiliki komitmen terhadap kehendak Allah, persamaan manusia, menjunjung tinggi rasa keadilan dan berupaya untuk melanjutkan misi profetik (kenabian). *Ketiga*, menghasilkan orang-orang yang memiliki kecakapan dan keterampilan yang tepat guna dalam rangka memenuhi tuntutan-tuntutan intelektual, moral, teknik dan profesional yang dibutuhkan masyarakat. *Keempat*, menghasilkan orang-orang yang mampu untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang berdaya guna, adil dan humanis.

Memang diakui bahwa sampai saat ini, ide untuk merealisasikan pendidikan Islam berbasis multikultural masih menuai sikap pro dan kontra. Menurut Mundzier Suparta (2008: 72), hal ini disebabkan karena sebagian kalangan beranggapan bahwa model pendidikan tersebut tidak mungkin diterapkan dalam konteks ke-Indonesiaan yang memiliki beragam agama dan kepercayaan sehingga dikhawatirkan hanya akan memberangus keyakinan (akidah) yang selama ini sudah tertanam dalam jiwa para anak didik. Apalagi jika hal ini kemudian dikaitkan dengan pemahaman yang sempit tentang pluralisme itu sendiri.

Bagaimanapun, pemahaman yang demikian itu perlu untuk diluruskan. Toleransi dan pluralisme yang ingin diajarkan Islam adalah menghargai dan menghormati keyakinan, kepercayaan, budaya dan kultur seseorang atau kelompok lain dengan sabar dan sadar. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa toleransi tidak berarti ikut membenarkan keyakinan atau kepercayaan orang lain. Tetapi sikap demikian itu lebih

kepada menghargai dan menghormati hak asasi yang ada pada orang lain, sekalipun berbeda dengan keyakinannya (Mundzier Suparta, 2008: 57).

Islam adalah agama rahmat bagi seluruh umat dan alam semesta. Oleh karena itu, Islam tidak mengajarkan sikap-sikap individualisme dan tidak membenarkan sikap fanatisme yang berlebihan. Justru sebaliknya, Islam mengajarkan kebersamaan dalam keberbedaan, menjunjung tinggi persaudaraan (*al-ukhuwah*) antar sesama. Di dalam ajaran Islam, tidak ada sedikitpun alasan untuk hidup saling bermusuhan. Tetapi Islam justru mengajarkan kasih sayang antar sesama manusia agar terbentuk tatanan masyarakat yang gotong-royong dan saling membantu atas dasar kecintaan. Tentu saja, konsep seperti ini dilakukan dengan tidak mempengaruhi kemurnian masing-masing agama yang diyakini kebenarannya oleh anak didik.

Atas dasar itulah Islam memberikan beberapa konsepsi hidup bermasyarakat yang riil. Apabila konsepsi ini diterapkan dengan baik niscaya semua manusia yang diciptakan berbeda-beda itu akan dapat hidup saling berdampingan dalam bingkai kebersamaan dan kesederajatan. Apa sajakah konsepsi hidup bermasyarakat yang telah ditawarkan Islam? Setidaknya terdapat lima hal yang telah ditawarkan Islam tentang hidup bermasyarakat, yakni: *pertama*, toleransi. Konsep ini ditawarkan Islam dalam menanggapi keragaman budaya, suku, bangsa, agama, bahasa dan seterusnya.

*Kedua*, dialog dan musyawarah. Islam adalah agama yang cinta damai. Karena itu, perdamaian yang dapat ditempuh melalui dialog dan musyawarah ditawarkan Islam sebagai jalan penyelesaian friksi dan perselisihan. *Ketiga*, tolong menolong. Berawal dari prinsip bahwa manusia adalah makhluk sosial, maka tolong menolong dan saling membantu sangat dianjurkan dalam Islam. *Keempat*, silaturahmi. Silaturahmi tidak hanya menghilangkan sekat dan perbedaan tetapi juga dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama, membuka pintu rizki dan memperpanjang umur. *Kelima*, persaudaraan. Dengan konsep ini, Islam dapat meraih puncak kejayaan, penyebaran Islam mendapat kemudahan dan mengikis perselisihan dan pertikaian yang terjadi.

Lima konsepsi dasar hidup bermasyarakat yang ditawarkan Islam di atas adalah suatu landasan fundamental dalam membangun suatu tatanan masyarakat yang

harmonis dan jauh dari konflik. Hanya saja, amat disayangkan jika belakangan ini konsep-konsep yang pernah digulirkan Rasulullah Muhammad s.a.w. itu mengalami distorsi makna yang cukup dalam. Saat ini, umat Islam justru terjebak pada sebuah makna literal dari ajaran agama sehingga konsep-konsep tersebut hanya diterapkan ketika menjalin persaudaraan dengan sesama umat Islam. Sementara, orang-orang non-Islam dianggap sebagai “pihak lain” yang menempati urutan ke sekian dalam relasi kehidupan.

Bahkan, yang lebih menyedihkan lagi ialah ketika konsep relasi tersebut semakin dipersempit maknanya. Konsep-konsep demikian itu bukan saja diimplementasikan terhadap sesama umat muslim, tetapi hanya ditujukan pada orang-orang yang “sealiran” dan “sefaham” keagamaan tertentu. Pemahaman parsial seperti inilah yang kemudian menjadikan umat Islam semakin termarginalkan (terpinggirkan) dan teralienasi (terasing) dari konstelasi besar umat manusia. Di samping itu, pemahaman umat yang sempit seperti ini juga telah ikut “mencoreng” wajah Islam yang inklusif dan universal.

Agar tidak terjebak pada pemahaman keagamaan yang sempit, maka umat Islam perlu melakukan refleksi dan sekaligus menggali nilai-nilai dasar ajaran Islam yang berhubungan dengan prinsip (pendidikan) multikultural. Musthafa as-Siba’i mencatat adanya beberapa prinsip dasar Islam dalam pendidikan multikultural, yaitu: *pertama*, bahwa agama samawi datang dari Allah s.w.t., Tuhan yang Maha Esa (Q.s. asy-Syura: 13). Agama yang dimaksud di sini adalah meng-Esa-kan Allah s.w.t., beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala larangan dan perintah-Nya.

*Kedua*, bahwa Nabi-Nabi adalah bersaudara, tidak ada perbedaan di antara mereka dalam hal misinya dan semua umat percaya dan beriman kepada mereka semua (Q.s. al-Baqarah: 136). *Ketiga*, bahwa akidah tidak dapat dipaksakan kepada orang lain untuk menganutnya. Sebaliknya, akidah memerlukan kesadaran dan kerelaan (Q.s. Yunus: 99). *Keempat*, bahwa tempat-tempat peribadatan agama-agama merupakan tempat suci yang harus dipelihara, dijaga dan dipertahankan sehingga umat beragama,

khususnya Islam, dapat menjalankan ibadah dengan baik (Q.s. al-Hajj: 40). *Kelima*, bahwa seluruh manusia tidak boleh bermusuhan dan saling membunuh hanya karena perbedaan kepercayaan dan keyakinan. Tetapi sebaliknya, seluruh manusia harus saling tolong-menolong dalam melakukan hal-hal yang konstruktif dan menjauhi hal-hal yang destruktif (Q.s. al-Maidah: 2).

*Keenam*, bahwa kelebihan manusia di hadapan Tuhan hanya karena ketakwaannya dan bukan karena yang lain (Q.s. al-Hujurat: 13). *Ketujuh*, bahwa perbedaan agama dan keyakinan tidak harus menjadi penghalang untuk berbuat baik, bersilatullah dan saling mengunjungi (Q.s. al-Maidah: 5). *Kedelapan*, bahwa diperlukan sebuah dialog yang baik dalam frame batas-batas sopan-santun sembari mengutarakan argumentasi yang memuaskan, ilmiah dan meyakinkan (Q.s. al-Ankabut: 46). *Kesembilan*, bahwa bila suatu umat dimusuhi karena akidah yang mereka anut, maka wajib baginya untuk membela diri dan menghapuskan permusuhan demi mempertahankan keyakinan dan menghindari malapetaka (Q.s. al-Mumtahanah: 9).

Konsep pendidikan multikultural yang terdapat dalam dasar-dasar ajaran Islam ini dimaksudkan untuk menjelaskan kepada anak didik tentang bagaimana agama Islam membina hubungan baik dengan penganut tradisi di luar Islam yang pernah dibawa Nabi Muhammad s.a.w. beberapa abad silam. Berdasar pada hal ini maka pendidikan Islam seyogyanya menjadikan dasar-dasar normatif tersebut sebagai landasan untuk merumuskan bagaimana semestinya proses pendidikan dalam Islam dikelola sehingga ia tidak asing dari masyarakat yang secara hukum alam punya budaya sendiri-sendiri.

## **F. Kesimpulan**

Berdasarkan pelbagai uraian dan penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka tulisan ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut. Pendidikan multikultural adalah suatu proses penanaman cara hidup menghormati, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural demi terciptanya persatuan dalam masyarakat. Pendidikan multikultural ini tidak harus dirancang khusus sebagai muatan substansi tersendiri, namun dapat diintegrasikan

dalam kurikulum yang sudah ada. Integrasi konsep pendidikan multikultural ini tentu saja dapat dilakukan melalui bahan ajar atau model pembelajaran.

Pendidikan multikultural tidak hanya dapat diterapkan dalam pendidikan formal tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam pendidikan formal, guru atau dosen memiliki peran kunci dalam implementasi konsep ini. Sementara, dalam pendidikan non-formal, peran-peran tersebut berada di dalam pundak orangtua. Dengan demikian, seorang guru atau dosen tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan.

Lebih dari itu, seorang pendidik juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme dan pluralisme. Dalam arti lain, seorang pendidik harus menanamkan nilai-nilai keberagaman yang inklusif pada anak didik. Dalam pendidikan, doktrin Islam tidak membedakan etnik, ras, agama dan lain sebagainya. Di hadapan Allah s.w.t. semua manusia adalah sama, dan yang membedakan di antara mereka hanyalah ketakwaannya. Dengan dasar ini maka Islam telah memberikan apresiasi yang cukup besar terhadap multikulturalisme. Islam juga telah memberi penghargaan terhadap ilmu pengetahuan sehingga tidak ada perbedaan di antara manusia dalam bidang ilmu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawar, Said Agil Husin. 2005. *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press
- Departemen Agama. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Syamil Cipta Media
- Halim, Muhammad Abdul. 1999. *Memahami Al-Qur'an Pendekatan Gaya dan Tema*. Bandung: Marja'
- Ismail, Faisal. 2004. *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Analisa Historis*. Jakarta: Mitra Cendekia
- Langgalung, Hasan. 1988. *Pendidikan Islam Menghadapi Abad 21*. Jakarta: Pustaka al-Husna
- Shihab, M Quraish. 2001. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Cet:1, Vol: 3. Jakarta: Lentera Hati
- Suparta, Mundzier. 2008. *Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: al-Ghazali Center
- Zubaidi. 2005. *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar

### Surat Kabar dan Internet:

- Asy'ari, Musa. *Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa*. dalam [www.uin-suka.info/ind/index.com](http://www.uin-suka.info/ind/index.com). diakses pada tanggal 1 April 2010
- <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/wacana-pendidikan-multikultural-diIndonesia>. diakses pada tanggal 1 April 2010
- <http://blog.unila.ac.id/effendisanusi>. diakses pada tanggal 1 April 2010
- <http://www.dipertais.net/annualconference>. diakses pada tanggal 1 April 2010
- [www.ilmupendidikan.net/kontribusi-teknologipendidikan-dalam-membangun-pendidikan-multikultural](http://www.ilmupendidikan.net/kontribusi-teknologipendidikan-dalam-membangun-pendidikan-multikultural). diakses pada tanggal 1 April 2010
- [www.ntt-academia.org/opini/JADAM-04-2007.doc](http://www.ntt-academia.org/opini/JADAM-04-2007.doc). diakses pada tanggal 1 April 2010